

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Anggaran Kunker Dewan Dipangkas

Turun 35 Persen di 2020

JAKARTA - Sekretariat DPRD DKI Jakarta memangkas pagu anggaran perjalanan dinas legislator Kebon Sirih pada 2020. Tak tanggung-tanggung, nilainya menyusut Rp44,59 miliar atau sekitar 35 persen dari anggaran tahun lalu. Hal tersebut berdasarkan keinginan para legislator Kebon Sirih periode sebelumnya.

Sekretaris DPRD DKI Jakarta Yuliadi mengatakan, total anggaran kerja Sekretariat DPRD DKI pada APBD Perubahan 2019 mencapai Rp307,79 miliar

berkurang Rp75,11 miliar atau menjadi Rp232,68 miliar pada tahun 2020.

Dia menguraikan, anggaran perjalanan dinas legislator tahun depan akan dikurangi dari 10 menjadi 2 tujuan saja. "Keinginan dewan yang lama memang dikurangi. Justru dampaknya mereka yang merasakan bakal lebih dekat dengan masyarakat DKI," ujar dia di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (16/9/2019).

Ia menuturkan, pengurangan anggaran perjalanan dinas tersebut juga bakal mengurangi komponen lainnya, seperti sewa hotel, konsumsi, uang harian

dan lainnya. Dengan adanya pengurangan anggaran perjalanan dinas ini, legislator bakal lebih fokus pada program legislasi mereka. "Sebagian legislator menginginkan seperti itu (pengurangan perjalanan dinas, Red). Mereka mau fokus legislasi di tahun depan," tutur Yuliadi.

Yuliadi membeberkan, anggaran perjalanan dinas yang dikurangi berdasarkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020. Anggaran perjalanan pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD DKI berkurang dari semula Rp76,05 miliar di APBD Perubahan turun

menjadi Rp26,34 miliar di KUA-PPAS 2020.

Pembahasan badan anggaran DPRD DKI, sambung Yuliadi, dari Rp 10,84 miliar menjadi Rp2,89 miliar, pembahasan panitia khusus dan kepanitian lainnya berkurang dari Rp27,32 miliar menjadi Rp6,88 miliar dan pembahasan badan musyawarah dewan dari Rp9,59 miliar menjadi Rp2,64 miliar.

"Selain itu, pemangkasan juga terjadi pada pembahasan badan kehormatan dewan dari Rp2,25 miliar menjadi Rp717 juta. Sedangkan, kunjungan kerja komisi dewan dikurangi dari Rp65,41 miliar menjadi Rp20,82 miliar. Secara keseluruhan ang-

garan kerja dewan berkurang 35 persen," urai dia.

Sementara, Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Dany Anwar mengatakan, anggaran perjalanan dinas dewan memang perlu dievaluasi. Namun, bukan berarti dewan tidak perlu melakukan kunjungan dinas. "Kunjungan dinas tetap diperlukan agar dewan tidak kuper (kurang pergaulan-red)," tandas dia dikonfirmasi, Senin (16/9/2019).

Yang terpenting, ucap Dany, anggota DPRD DKI yang melakukan perjalanan dinas bisa mempertanggungjawabkan anggaran yang telah dikeluarkan dengan masukan yang

didapat dari kunjungan tersebut. "Jadi ada hasilnya. Tapi kalau keseringan memang tidak bagus juga," kata dia.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justine Adrian mengatakan, para wakil rakyat Jakarta sudah harus menghilangkan kebiasaan menghambur-hamburkan uang rakyat yang dibungkus dengan kegiatan kunker.

"Kunker kalau tak ada manfaatnya buat apa. Masyarakat itu memilih wakilnya di DPRD untuk bekerja mensejahterakan rakyatnya. Bukan uang rakyat malah dihamburkan untuk memenuhi nafsu jalan-jalan keliling dunia para anggota de-

wan," ujar dia di gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (16/9/2019).

Justine mengatakan, dengan APBD DKI yang tembus kurang lebih Rp90 triliun, diharapkan bisa bermanfaat untuk pembangunan di ibukota. Dengan begitu, masyarakat bisa menikmati hasil pembayaran pajak yang dilakukan lewat pemotongan pendapatan hasil keringat warga Jakarta.

Terlebih, lanjut Justine, PSI pun akan mendesak agar keberangkatan kunjungan kerja domestik, hanya enam kali setahun. Sementara, untuk kunjungan kerja ke luar negeri hanya dua kali. (aen)